

# Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Di Kecamatan Marangkayu Kutai Kartanegara

Masna Wati<sup>\*1</sup>, Engla Despahari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Mulawarman, Samarinda  
Barong Tongkok Kampus Gn.Kelua Universitas Mulawarman  
e-mail: <sup>\*1</sup>masnawati.ssi@gmail.com, <sup>2</sup>engla\_despahari@yahoo.com

## Abstrak

*Kelurahan/desa di kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip Pedoman Standar Pelayanan. Untuk peningkatan mutu pelayanan maka dibutuhkan suatu sistem pelayanan pada kelurahan sehingga mempermudah kinerja penyelenggara pelayanan di kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan aparat yang menjadi sistem terkomputerisasi serta mempermudah pendataan/pengarsipan data administrasi warga. Sistem yang dihasilkan dapat digunakan untuk melayani proses permohonan warga berupa surat permohonan keterangan domisili, permohonan pembuatan Kartu Keluarga, permohonan pembuatan KTP, permohonan SKCK dan permohonan pindah domisili yang dibutuhkan warga untuk proses selanjutnya di tingkat kecamatan.*

**Kata kunci**—Mutu Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Surat Permohonan, Kelurahan

## 1. PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [1]. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur yang turut serta berpartisipasi melaksanakan otonomi daerah sesuai Perda Kab. Kukar No 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara [2]. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu tugas dari seksi pemerintahan yaitu mengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil serta ketenagakerjaan [3].

Pemerintah desa/kelurahan mendapatkan penugasan dari pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Beberapa jenis pelayanan pelayanan yang ada pada bagian Kasi Pemerintahan yaitu Surat Keterangan Kehilangan, Surat Keterangan Domisili Penduduk, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Kelahiran [4]. Untuk peningkatan mutu pelayanan maka dibutuhkan suatu sistem pelayanan terpadu pada kelurahan sehingga pengolahan data lebih cepat dan akurat, serta mempercepat siklus informasi yang dibutuhkan dan menjadi sarana penunjang aktivitas kependudukan yang kondusif, praktis dan akurat dalam penyajian data dan informasi kependudukan [5].

Kelurahan/desa di kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip Pedoman Standar Pelayanan, namun pelayanan yang diberikan belum

maksimal karena keterbatasan perangkat atau media pelayanan. Faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengimbangi tugas yang ada saat ini serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai pelayanan yang diberikan pihak kelurahan menjadi terbatas [9].

Pada proses pelayanan administrasi di kecamatan Marangkayu telah menggunakan perangkat komputer, namun penyimpanan data masih menggunakan sebuah buku besar untuk menulis data surat administrasi warga. Sementara itu, pencatatan data penduduk merupakan kegiatan yang rutin dilakukan pemerintah yang terdiri dari data pindah, data pendatang, data kelahiran dan data kematian. Hal ini menyebabkan masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu, sehingga masyarakat menilai petugas tidak profesional berakibat timbulnya citra yang kurang baik terhadap pemerintah [10],[11].

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana membangun sistem informasi manajemen administrasi kependudukan pada kelurahan/desa di kecamatan Marangkayu yang bertujuan untuk mempermudah kinerja penyelenggara pelayanan di kelurahan dan meningkatkan kualitas pelayanan aparat yang masih manual berubah menjadi sistem terkomputerisasi sehingga mempermudah pendataan/pengarsipan data administrasi warga. Ruang lingkup bahasan dalam artikel ini yaitu pengolahan data surat keterangan bagian pemerintahan yaitu surat permohonan KK, KTP, Domisili, SKCK dan Surat Pindah.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pengumpulan data di lapangan (*field research*) menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: [6]

1. Wawancara, dilakukan kepada pihak kelurahan/desa di kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah penelitian dan hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain serta data kuantitatif yang dibutuhkan dalam sistem.
2. Observasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang obyek permasalahan dan melakukan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.

Selain itu, dilakukan kajian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh teori-teori dan hasil penelitian yang terkait untuk mendukung penelitian penulis.

### 2.2 Tahapan Penelitian

Secara garis besar proses penelitian ini mengikuti model proses perangkat lunak sehingga bersesuaian dengan tujuan dari penelitian ini yaitu membangun suatu sistem informasi. Model proses perangkat lunak yang digunakan adalah model *waterfall* yang terdiri dari 5, yaitu: (1) perencanaan penelitian, (2) *requirement analysis*, (3) *software design and modeling*, (4) *software development* dan (5) *software testing* [7], yang disajikan pada Gambar 1.

#### a. Perencanaan penelitian

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah di lokasi penelitian dan melakukan pengumpulan data baik secara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait sehingga diperoleh data dan informasi mengenai standar dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kelurahan/desa serta melakukan kajian-kajian terhadap teori-teori pengembangan sistem.

#### b. *Requirement analysis*

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan rancang bangun sistem. Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan sistem baik kebutuhan fungsional dan non-

---

fungsional sesuai hasil identifikasi masalah, analisis kebutuhan data dan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil analisis serta analisis batasan sistem.

c. *Software design and modeling*

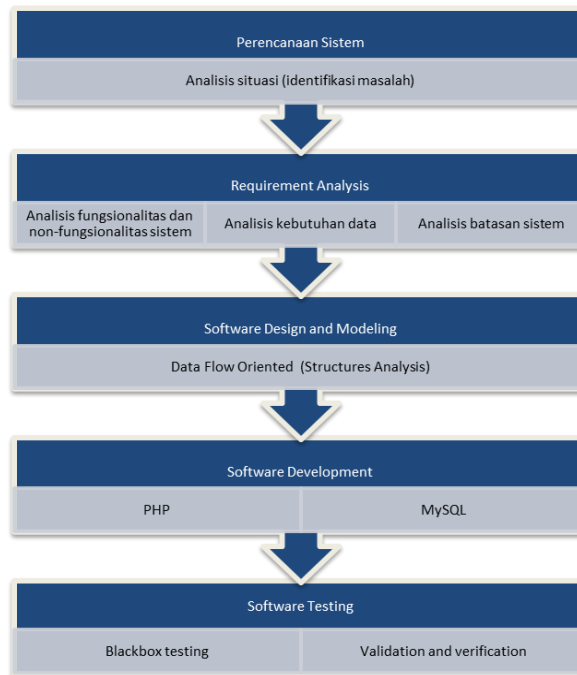
Terdapat modul SIMDUK aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan [8]. Didasari adanya modul tersebut dan dari hasil analisis kebutuhan sistem yang dilakukan pada tahap sebelumnya dimana proses pelayanan dibedakan berdasarkan kategori surat maka dilakukan perancangan sistem. Sistem dirancang berorientasi pada aliran data (*data flow oriented*) menggunakan model analisis terstruktur yang terdiri dari beberapa diagram, antara lain: diagram konteks, *data flow diagram* (DFD), *entity relationship diagram* (ERD), tabel basis data dan mockup antarmuka.

d. *Software development*

Penulisan kode program agar dimengerti oleh mesin, maka rancangan sistem harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses *coding* menggunakan PHP, *database MySQL*.

e. *Software testing*

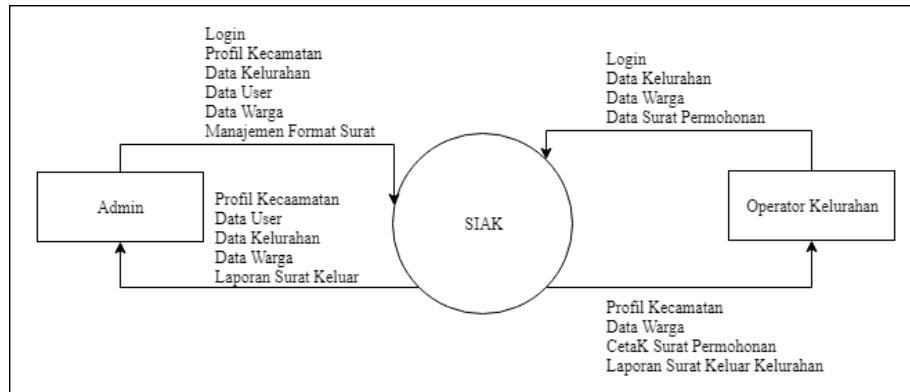
Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem berupa pengecekan error atau bug sistem menggunakan teknik *blackbox testing*.



Gambar 1. Tahapan Penelitian  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

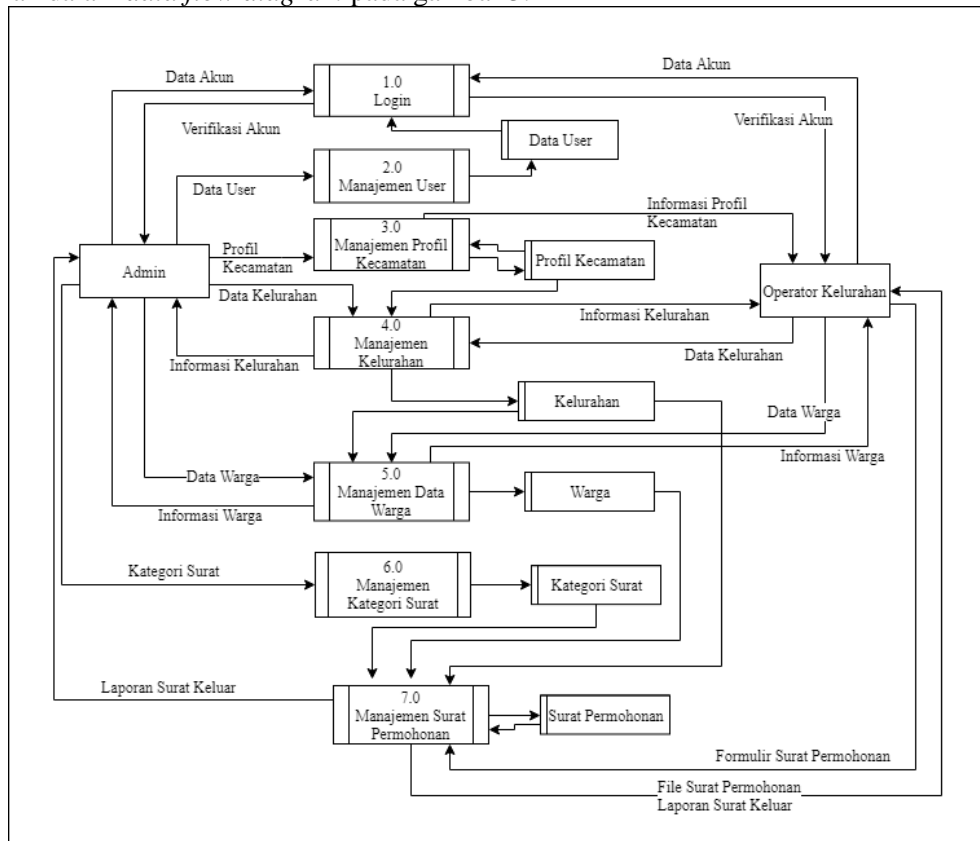
3.1 Hasil Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem, maka dilakukan perancangan sistem melalui diagram konteks, DFD dan ERD. Diagram konteks pada gambar 2 memberikan gambaran lingkungan sistem yang dibangun, dimana memiliki dua level pengguna yaitu staf kecamatan sebagai admin dan operator kelurahan yang berfungsi sebagai operator yang bertindak melayani masyarakat.

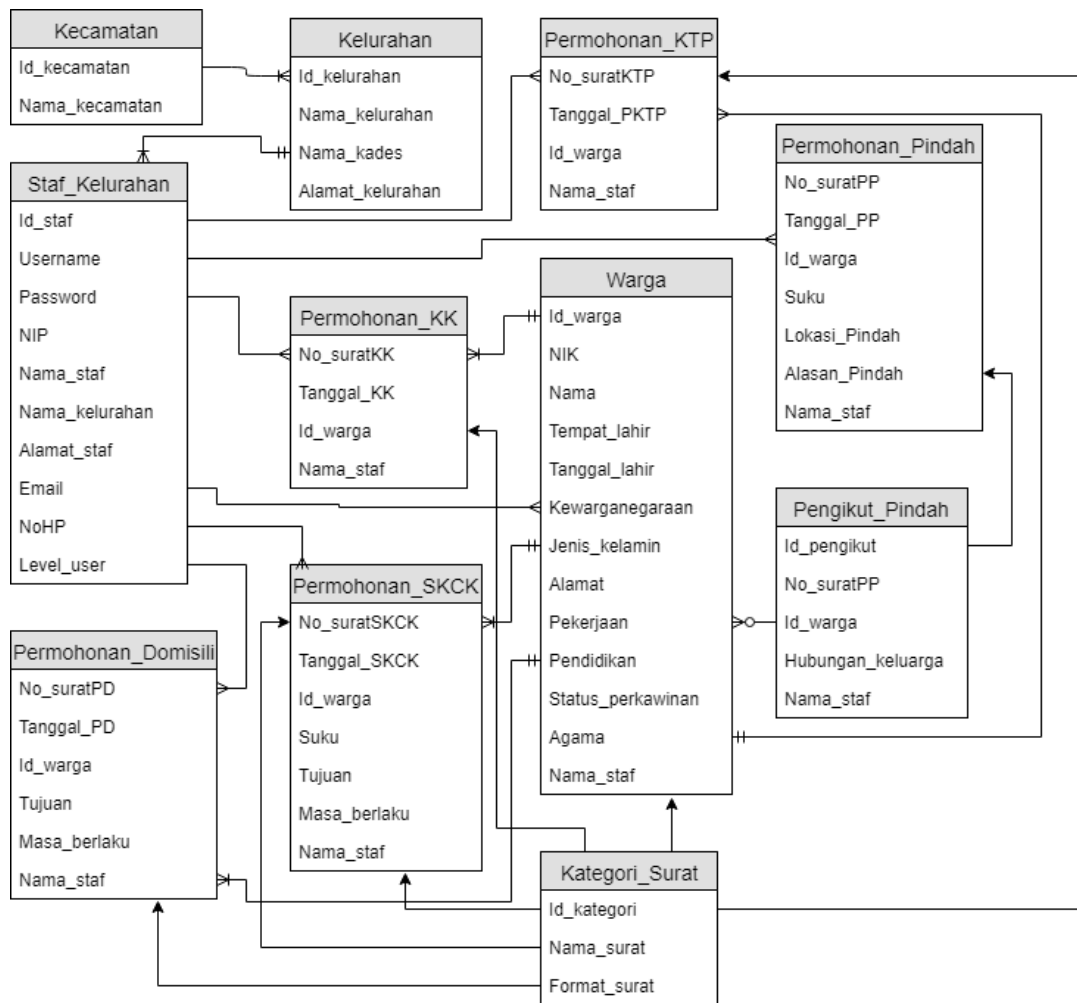


Gambar 2. Diagram Konteks

Pada sistem ini terdapat terdapat lima proses utama yaitu manajemen surat permohonan, manajemen kategori surat, manajemen data warga, manajemen kelurahan, manajemen kecamatan dan manajemen user. Setiap user diharuskan login ketika ingin mengakses fungsi-fungsi yang ada dalam sistem. Proses-proses dan aliran data yang terjadi di dalam sistem disajikan dalam *data flow diagram* pada gambar 3.

Gambar 3. *Data Flow Diagram*

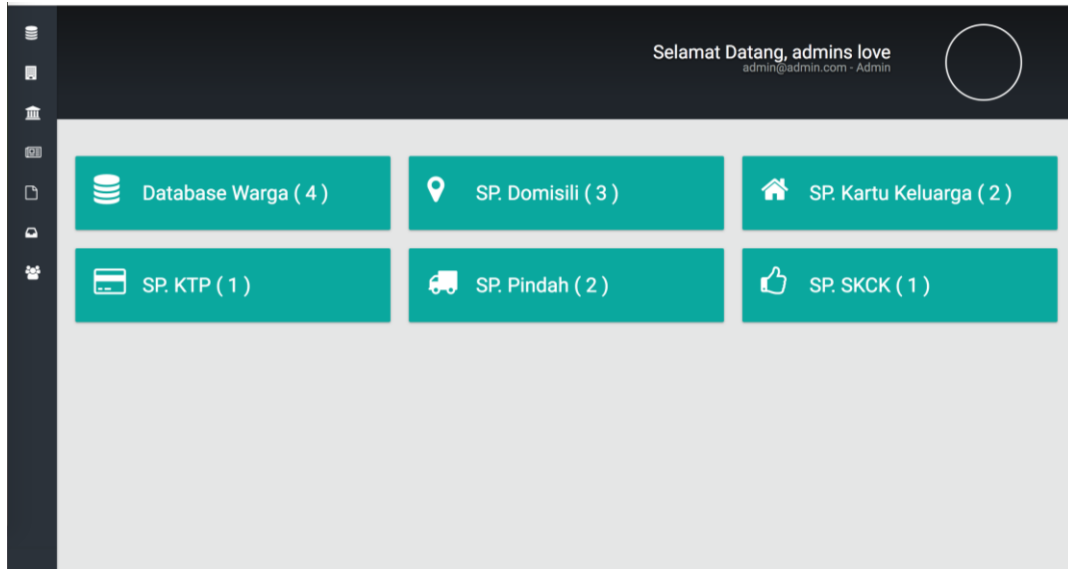
Pada sistem ini terdapat lima kategori surat yang dikelola, yaitu surat permohonan domisili, surat permohonan Kartu Keluarga (KK), surat permohonan KTP, surat permohonan pindah dan surat permohonan SKCK. Setiap pengelolaan surat ini selalu terhubung pada data warga sehingga surat yang dikeluarkan bersesuaian dengan data warga di setiap kelurahan. Hubungan antardata dalam sistem ini disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Entity Relationship Diagram

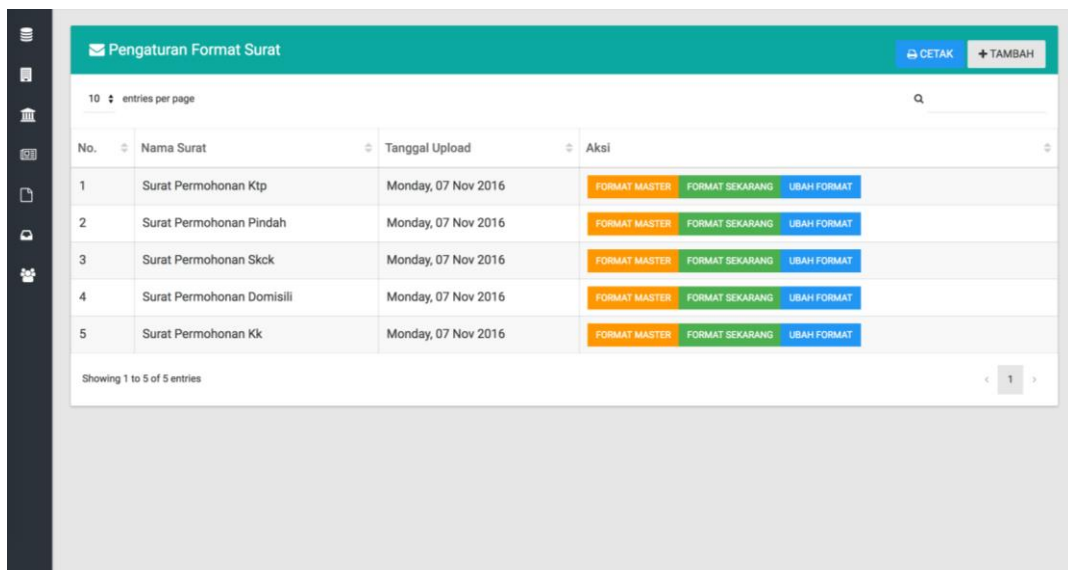
### 3.2 Antarmuka Sistem

Sistem yang dibangun didasari pada hasil perancangan sistem, dimana sistem memiliki dua level pengguna yaitu admin kecamatan dan operator kelurahan. Kegiatan admin berfokus pada pengelolaan data user di setiap kelurahan dan pengelolaan kategori surat dimana setiap surat memiliki format masing-masing serta memperoleh laporan data surat di setiap kelurahan. Kegiatan utama operator kelurahan adalah mengelola data surat di kelurahan masing-masing. Gambar 5 adalah tampilan halaman utama sistem ketika user berhasil melakukan login. Halaman utama berisi menu data warga dan menu-menu surat yang dikelola yaitu surat permohonan domisili, surat permohonan Kartu Keluarga (KK), surat permohonan KTP, surat permohonan pindah dan surat permohonan SKCK.



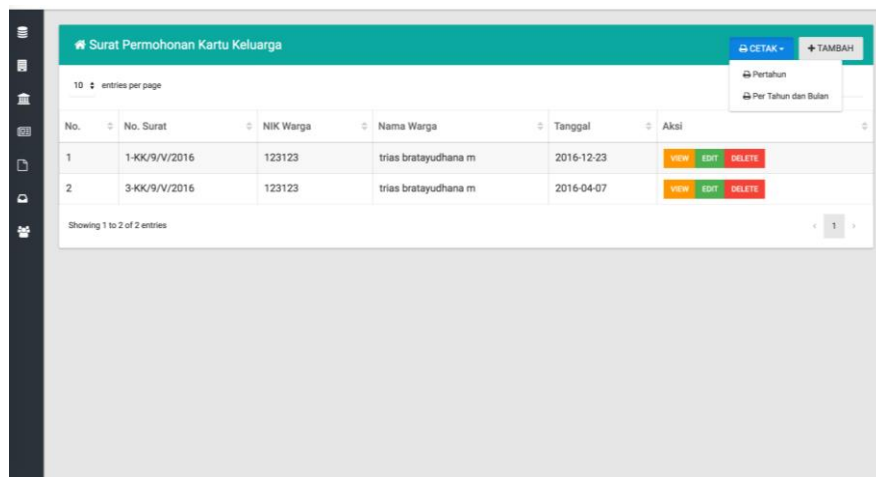
Gambar 5. Halaman Utama Sistem

Pada tingkat kelurahan terdapat lima jenis surat permohonan warga yang dilayani kelurahan. Setiap surat memiliki format masing-masing. Untuk pengaturan format surat dilakukan di tingkat kecamatan sehingga format surat yang beredar di setiap kelurahan seragam. Gambar 6 merupakan halaman pengaturan format surat yang terdapat pada admin kecamatan. Halaman ini tidak disediakan di lever operator kelurahan.



Gambar 6. Halaman Pengaturan Format Surat pada Admin

Untuk melakukan pengelolaan surat setiap kategori, maka user dapat mengakses melalui menu yang terdapat pada halaman utama. Gambar 7 merupakan halaman yang ditampilkan dari salah satu menu yang terdapat pada halaman utama. Pada halaman ini, user dapat melakukan pengelolaan surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Halaman inilah menggambarkan proses pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada warga oleh pihak kelurahan.



Gambar 7. Halaman Pengelolaan Surat

Ketika dilakukan penginputan data pada halaman pengelolaan surat maka user dapat mencetak surat sesuai data yang telah diinput tersebut. Pada proses penginputan data, system memanggil data dari tabel warga pada database sesuai dengan NIK warga yang diinput. Contoh surat yang dihasilkan system sesuai data yang diinput disajikan pada gambar 8.



Gambar 8. Tampilan Surat

#### 4. KESIMPULAN

Sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan yang dibangun dapat mengelola dan melayani warga untuk pembuatan surat permohonan domisili, surat permohonan Kartu Keluarga (KK), surat permohonan KTP, surat permohonan pindah dan surat permohonan SKCK. Sistem ini juga mengelola data warga sehingga setiap pengelolaan surat selalu terhubung pada database warga sehingga surat yang dikeluarkan bersesuaian dengan data warga di setiap kelurahan. Dengan adanya sistem ini, dapat mengurangi kesalahan pihak kelurahan dalam pembuatan surat karena format surat telah diatur oleh system serta membantu dalam pengarsipan yang tertata dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
  - [2] Kabupaten Kutai Kartanegara. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tenggarong.
  - [3] Kabupaten Kutai Kartanegara. 2008. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong.
  - [4] Anton Yudi Setianto S. L., 2009, Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen Pribadi, Keluarga & Bisnis, Niaga Swadaya, Jakarta.
  - [5] Ariyadi, B.M. and Bahar, B., 2017. Model Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Pada Kantor Kelurahan. JUTISI, 5(1).
  - [6] Muhadjir, N., 2006. Metode Penelitian. Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung.
  - [7] Pressman, R.S, 2010, Software Engineering: a practitioner's approach, McGraw-Hill, New York.
  - [8] Dengen, N. and Hatta, H.R., 2009. Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, 4(1), pp.47-54.
  - [9] Hidayat, A., 2016. Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dikelurahan Pelabuhan Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2016, 4 (1) : 607-618
  - [10] Noviyanto, F., Setiadi, T. and Wahyuningsih, I., 2014. Implementasi Sikades (Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. Jurnal Informatika, 8(1).
  - [11] Ibrahim, A., Rifai, A. and Oktarina, L., 2016. Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Data Kependudukan Kelurahan Pahlawan Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi, 8(1).
  - [12] Budiman, E., 2017. E-Government Data Profil dan Monografi Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Jurnal Online STMIK Kharisma Makassar, 3(1), 49-58
-